



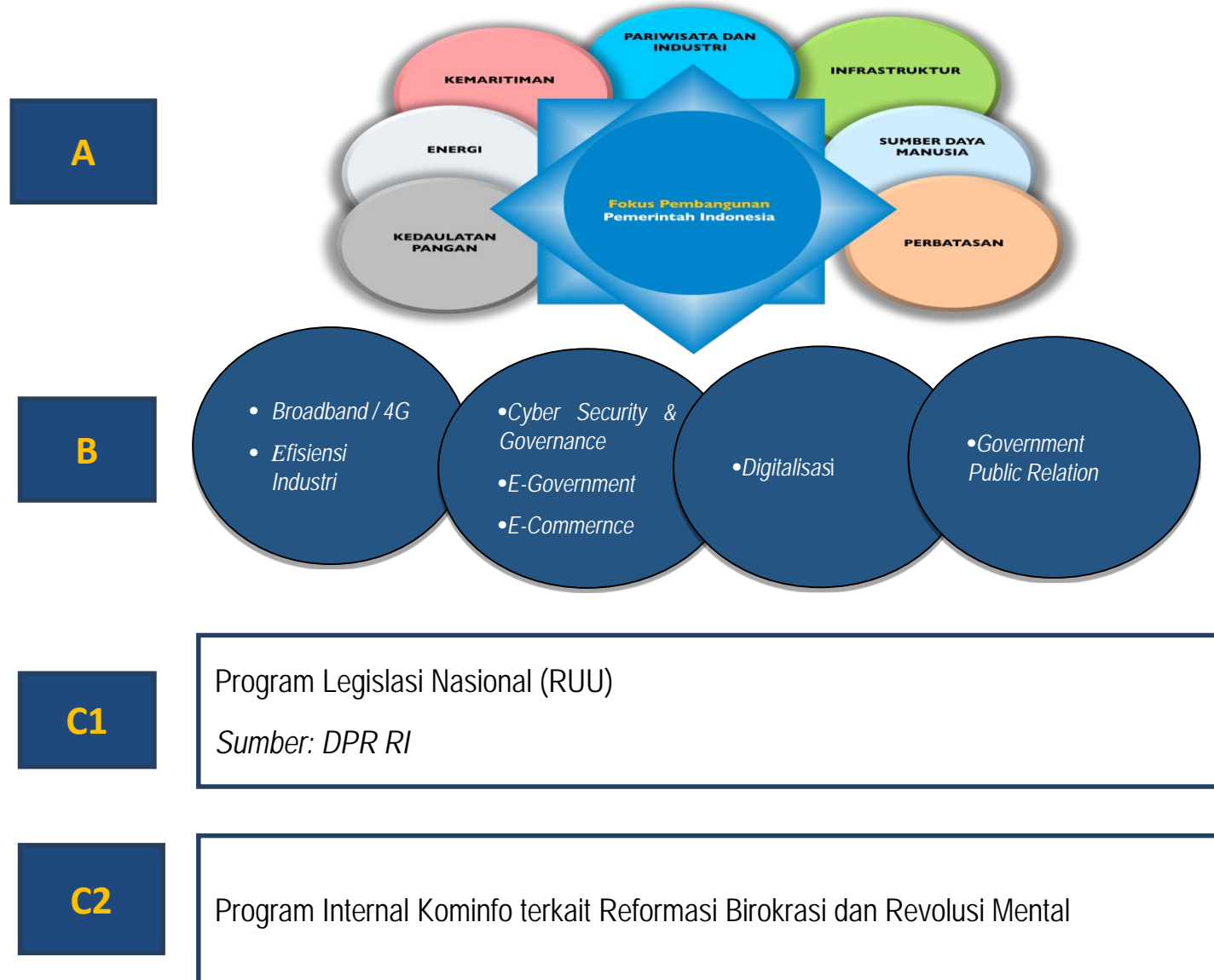
KEMKOMINFO

**PENYUSUNAN REVISI
RENCANA STRATEGIS DITJEN
PPI 2015-2019**

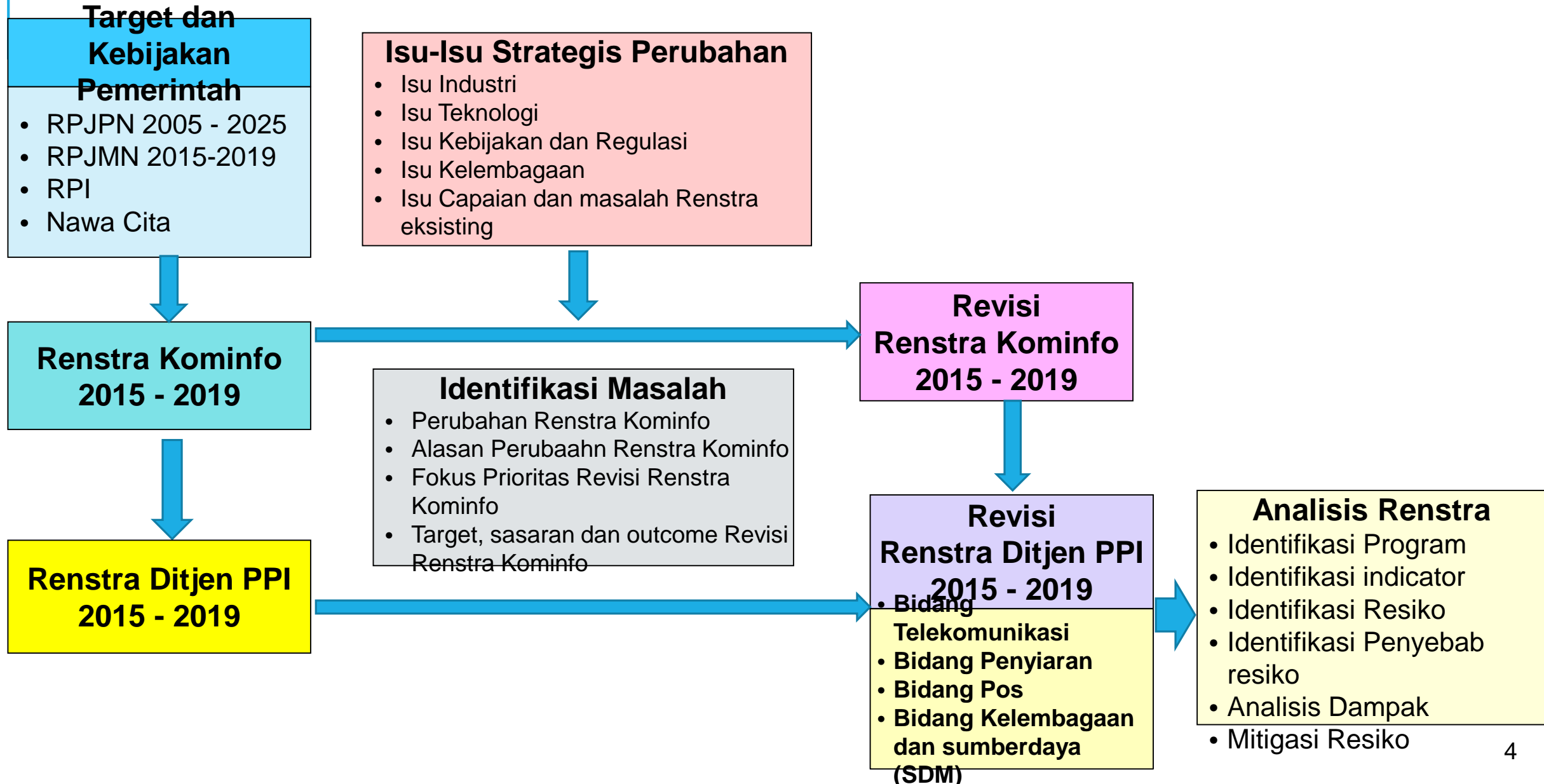
Agenda Pembahasan



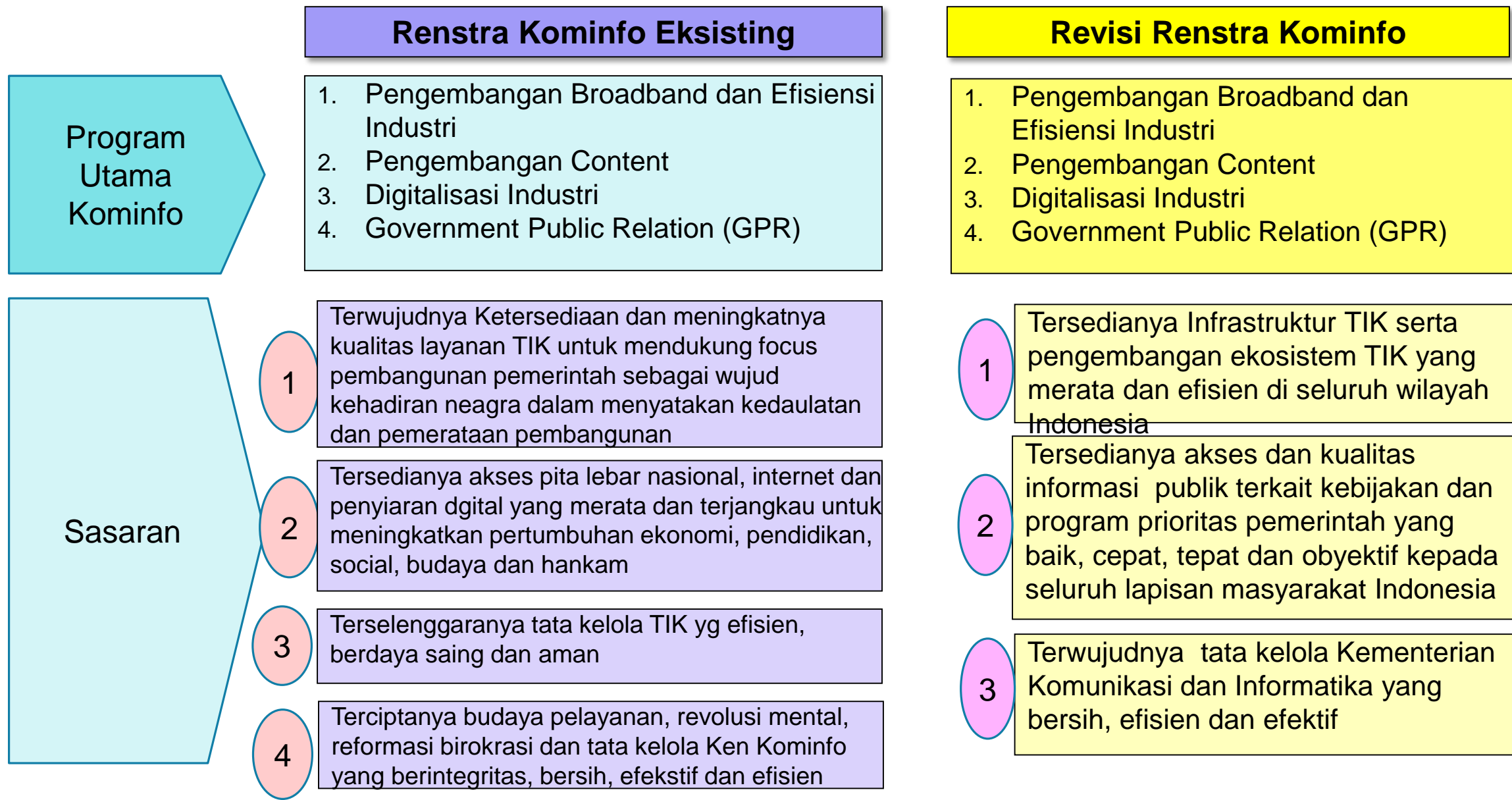
4 BESARAN PROGRAM UTAMA KEMKOMINFO



KERANGKA PENYUSUNAN REVISI RENSTRA DITJEN PPI



PERUBAHAN RENSTRA KOMINFO 2015 - 2019



PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA KOMINFO

Sasaran 1

Terwujudnya Ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan TIK untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran neagra dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan

| | |
|---|--|
| 1 | Jumlah pembangunan sarana/ Tugu Berkode Pos di Wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia |
| 2 | Persentase (%) penyelesaian Redesain USO |
| 3 | Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blankspot</i> Layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar & Terpencil) |
| 4 | Jumlah penyediaan akses <i>pitalebar</i> internet |
| 5 | Persentase (%) tersedianya satelit pitalebar Nasional |

PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA KOMINFO

Sasaran 2

Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya dan hankam

| | |
|---|--|
| 1 | Persentase (%) ketersediaan spectrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak pitalebar |
| 2 | Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring |
| 3 | Persentase (%) selesainya migrasi system penyiaran televisi dari analog ke digital |
| 4 | Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (<i>single publik emergency number</i>) |
| 5 | Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki |

1

Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

| | |
|---|---|
| 1 | Persentase (%) Kab/Kota terhubung jaringan <i>backbone</i> serat optik <i>palapa ring</i> (Jumlah Kab/ kota: 514) |
| 2 | Persentase (%) Kab/Kota terlayani Akses broadband 4G LTE (Jumlah Kab/kota: 514) |
| 3 | Persentase (%) desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah desa di wilayah tertinggal termasuk lokpri : 19.000 Desa) |
| 4 | Persentase (%) kawasan perbatasan terlayani jasa akses telekomunikasi (Jumlah kawasan perbatasan: 147 Lokasi) |
| 5 | Persentase (%) harga layanan pita lebar terhadap PDB per kapita |
| 6 | Persentase (%) implementasi digitalisasi |

PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA KOMINFO

Sasaran 2

Tersedianya akses pita lebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya dan hankam

| | |
|---|--|
| 6 | Persentase (%) penetapan dan implemmentasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE |
| 7 | Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layanan e-government Nasional |
| 8 | Jumlah penyelenggara jaringan telekomunikasi yang Mengimplementasikan DNS Nasional |
| 9 | Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan Kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna |

1

Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

| | |
|---|--|
| 7 | Persentase (%) nelayan dan petani <i>go digital</i> (<i>Jumlah petani + nelayan per tahun 2013: 28,7 Juta</i>) |
| 8 | Persentase (%) UMKM <i>go digital</i> (<i>Jumlah UMKM per tahun 2012: 56 juta</i>) |
| 9 | Persentase (%) desa di wilayah perbatasan, daerah tertinggal termasuk lokpri tersedia layanan digital (<i>Jumlah desa di wilayah perbatasan, daerah</i> |

2

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

| | |
|---|--|
| 1 | Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik (<i>Survei Responden/Publik</i>) |
|---|--|

PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA KOMINFO

Sasaran 3

Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman

- | | |
|---|---|
| 1 | Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi |
| 2 | Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan <i>National Chief Information Officer (NCIO)</i> |
| 3 | Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan Sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan |
| 4 | Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik |
| 5 | Jumlah regulasi terkait implementasi <i>Government Public Relations (GPR)</i> |

PERUBAHAN SASARAN DAN INDIKATOR RENSTRA KOMINFO

Sasaran 4

Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Ken Kominfo yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien

| | |
|---|---|
| 1 | Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial Ekonomi implementasi <i>pitalebar</i> , internet, dan Digitalisasi Penyiaran) |
| 2 | Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda |
| 3 | Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo |
| 4 | Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas |
| 5 | Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kemkominfo |
| 6 | Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan |

Sasaran 3

Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif

| | |
|---|-----------------------------|
| 1 | Opini laporan keuangan |
| 2 | Indeks Reformasi Birokrasi |
| 3 | Nilai akuntabilitas kinerja |

PEMETAAN SASARAN KOMINFO MENJADI SASARAN DJPPI

Sasaran Strategis Kominfo

1

Tersedianya Infrastruktur TIK serta pengembangan ekosistem TIK yang merata dan efisien di seluruh wilayah Indonesia

2

Tersedianya akses dan kualitas informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah yang baik, cepat, tepat dan obyektif kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia

3

Terwujudnya tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersih, efisien dan efektif

Sasaran Program DJPPI

1. Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertib administrasi, sehat, adil dan berkelanjutan.
2. Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia.
3. Terwujudnya ASO (Analog Switch Off) Bidang Penyiaran.
4. Terwujudnya ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk memberikan kontribusi peningkatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara.

5. Terlaksanannya tata kelola Ditjen PPI yang bersih, efektif dan effiseien.

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 1 : Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertib administrasi, sehat, adil dan berkelanjutan

| IKP 1 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|--|---|---|--|---|--|---|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Jumlah regulasi yang mengikuti perkembangan dan mampu mendukung efisiensi penyelenggaraan bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran | <ul style="list-style-type: none"> Regulasi bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran | <ul style="list-style-type: none"> penyusunan RUU atau UU Perubahan penyusunan RPP Penyelenggaraan Telekomunikasi Menyelesaikan Penyusunan aturan Teknis lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RUU Penyiaran Penyusunan Blueprint Industri dan lanskap industri Kajian persiapan ASO Penyusunan aturan Teknis lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RUU Pos Penyusunan Regulasi Tarif layanan Pos Penyusunan Regulasi tentang Tatacara Pengangkatan Tim Seleksi, Tata Kerja Tim Seleksi dan Tatacara Penunjukkan Penyelenggaraan LPU Penyusunan aturan Teknis lainnya | <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Regulasi dan Kebijakan Pengembangan infrastruktur dan ekosistem broadband dan infrastruktur telekomunikasi khusus | Mekanisme pengawasan dan pengendalian bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran yang efektif dan efisien |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 1 : Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertib administrasi, sehat, adil dan berkelanjutan

| IKP 2 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|--|--|---|---|---|---|-------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Persentase tarif layanan penyelenggaraan bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran yang terjangkau dibanding dengan GDP | <ul style="list-style-type: none"> Tarif fixed broadband < 5% dari GDP Tarif Mobile Broadband < 5% dari GDP Tarif sewa mux yang terjangkau bagi penyelenggara TV Digital Tarif layanan Pos yang terjangkau bagi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> Pengaturan Tarif Pungut Pengaturan tarif interkoneksi Pengaturan Tarif Layanan Data Pengaturan Tarif sewa jaringan | <ul style="list-style-type: none"> Formulasi tarif sewa mux yang mendukung rencana ASO | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi efektivitas implementasi tarif LPU di seluruh kantor pos di Indonesia Pemetaan Besaran tariff LPK yang diberlakukan penyelenggara Pos sebagai implementasi PM 01 tahun 2012 tentang Formula Tarif LPK | <ul style="list-style-type: none"> Mendorong percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah Non 3T dan pembentukan ekosistem pita lebar dengan pengembangan komunitas, sector, kawasan dan sentra | |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 1 : Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertib administrasi, sehat, adil dan berkelanjutan

| IKP 3 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|---|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Persentase Pencapaian PNBP bidang pos, telekomunikasi dan penyiaran | <ul style="list-style-type: none"> 100% tercapainya target PNBP bidang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran | <ul style="list-style-type: none"> Kajian Pembentukan Lembaga Pengelolaan Penomoran IP | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan validasi data based Perijinan bidang Penyiaran menggunakan SIMP3 Evaluasi besaran Tarif IPP Penyusunan Broadcasting Fund sebagai Kontribusi PNBP | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Besaran Kontribusi LPU | | <ul style="list-style-type: none"> SOP penetapan dan penagihan BHP Telekomunikasi dan kontribusi LPU POS |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 1 : Terwujudnya industri pos, telekomunikasi dan penyiaran yang tertib administrasi, sehat, adil dan berkelanjutan

| IKP 4 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|---|---|--|---|----------------|--|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Persentase tingkat kepatuhan Penyelenggara Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran terhadap peraturan perundang undangan | <ul style="list-style-type: none"> 100% Penyelenggara bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran patuh terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku | <ul style="list-style-type: none"> Perkuatan skema sanksi dalam perundang – undangan Penyempurnaan tatacara Perizinan Evaluasi Penyampaian RFR dan DPI dari para penyelenggara Jaringan Telekomunikasi | <ul style="list-style-type: none"> Perkuatan skema denda sanksi dalam perundang – undangan Penyempurnaan tatacara perizinan melalui Pengembangan SIMP3 penyiaran | <ul style="list-style-type: none"> Perkuatan skema sanksi denda dalam perundang – undangan Penyempurnaan tatacara perizinan Evaluasi Penyampaian dokumen LPU | | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Sanksi denda Pengujian QoS Penilaian TKDN bidang Telekomunikasi Evaluasi Pelaporan LKO |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 2 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia

| IKP 1 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | | |
|--|---|--|----------------|----------|--|--|--|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian | |
| Persentase peningkatan penetrasi fixed broadband di wilayah perkotaan dan pedesaan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah homepass di wilayah perkotaan dan pedesaan | <ul style="list-style-type: none"> Regulasi Restrutkurisasi perizinan penyelenggaraan jaringan Tetap Regulasi Komitmen pembangunan (Modern Lisencing) untuk penyelenggaraan jaringan tetap | | | <ul style="list-style-type: none"> | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pencapaian RPI Pemetaan pencapaian infrastruktur pita lebar perkotaan dan pedesaan Pemetaan ekosistem pita lebar perkotaan dan pedesaan | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan database jumlah penyelenggara, jumlah pelanggan dan kapaistas per wilayah kecamatan Pengendalian pencapaian komitmen pembangunan penyelenggara |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 2 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia

| IKP 2 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|--|---|----------------|----------|--|--|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Persentase peningkatan penetrasi mobile broadband di wilayah perkotaan dan pedesaan | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah BTS di wilayah perkotaan dan pedesaan | <ul style="list-style-type: none"> Regulasi Komitmen pembangunan (Modern Lisencing) untuk penyelenggaraan jaringan selular | | | <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi pencapaian RPI Pemetaan pencapaian infrastruktur pita lebar perkotaan dan pedesaan Pemetaan ekosistem pita lebar perkotaan dan pedesaan Diseminasi kebencanaan Emergency call | <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan database jumlah penyelenggara, jumlah pelanggan dan kapaistas per wilayah kecamatan Pengendalian pencapaian komitmen pembangunan penyelenggara |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 2 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia

| IKP 3 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|----------|---|---|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Peningkatan kualitas layanan telekomunikasi fixed dan mobile di seluruh Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> Peraturan QoS Maknisme pengukuran QoS yang tepat dan efisien | | | | <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan ekosistem pita lebar pra dan pasca infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> Regulasi QoS Pengukuran QoS layanan Fixed dan Mobile |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 2 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia

| IKP 4 | Output | Peta Peran DJPPI |
|--|---|---|
| | | BP3TI |
| Persentase ketersedianya infrastruktur penyiaran di wilayah Lokpri dan 3 T | <ul style="list-style-type: none">Jumlah pemancar siaran di wilayah lokpri dan 3T | <p>Pembangunan Akses Penyiaran oleh BP3TI :</p> <ul style="list-style-type: none">Pengadaan Perangkat Pemancar Penyiaran radio dan Televisi |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 2 : Terwujudnya pemerataan infrastruktur dan layanan pos, telekomunikasi dan penyiaran di seluruh wilayah Indonesia

| IKP 5 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|--|--|---------------------|----------------|---|----------------|-------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Persentase KPCLPU yang beroperasi di seluruh wilayah Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Jumlah KPCLPU yang dibiayai bantuan operasional PSO | | | <ul style="list-style-type: none"> Verifikasi lapangan dan dokumen bantuan operasional layanan pos universal Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan dana PSO untuk KPCLPU Pemetaan pembangunan KPCLPU | | |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 3 : Terwujudnya ASO (Analog Switch Off) Bidang Penyiaran

| IKP 1 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|---|---|--|----------|---|-------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Jumlah regulasi penyelenggara penyiaran digital | <ul style="list-style-type: none"> • RUU Penyiaran | <ul style="list-style-type: none"> • Harmonisasi Regulasi telekomunikasi dengan Regulasi penyiaran digital | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian RUU Penyiaran • Kajian teknis persiapan ASO (alokasi kanal, skema MUX, SFN/MFN, Digital deviden) • Regulasi tarif sewa mux • Regulasi Reposisi TV analog menuju TV Digital | | <ul style="list-style-type: none"> • Uji Coba Penyelenggaraan TV Digital | |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 3 : Terwujudnya ASO (Analog Switch Off) Bidang Penyiaran

| IKP 2 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|--|--|---------------------|---|----------|----------------|-------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Persentase infrastruktur pemancar LPP TVRI dan RRI yang memiliki pemancar digital (ready to digital) | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah pemancar LPP TVRI dan RRI | | <ul style="list-style-type: none"> Mendorong skema pembangunan pemancar digital di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung ASO | | | |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 3 : Terwujudnya ASO (Analog Switch Off) Bidang Penyiaran

| IKP 3 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|--|---------------------|--|----------|----------------|-------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Jumlah Provinsi yang dilaksanakan sosialisasi penyelenggaraan penyiaran digital | <ul style="list-style-type: none">100% Program sosialisasi TV Digital di Ibu Kota Provinsi | | <ul style="list-style-type: none">Melakukan sosialisasi di minimal ibu kota provinsi | | | |

PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 4 : Terwujudnya ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk memberikan kontribusi peningkatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara

| IKP 1 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|---|---|---------------------|----------------|----------|--|-------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Jumlah komunitas/sentra/kawasan/sector tematik yang terbentuk dalam memanfaatkan infrastruktur telekomunikasi/broadband | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah komunitas/sentra/kawasan/sector broadband di berbagai bidang | | | | <ul style="list-style-type: none"> Pembentukan ekosistem broadband sector pemerintah Pembentukan ekosistem broadband untuk komunitas Pembentukan ekosistem broadband untuk Kawasan terpadu Pembentukan ekosistem broadband untuk Sentra industri | |

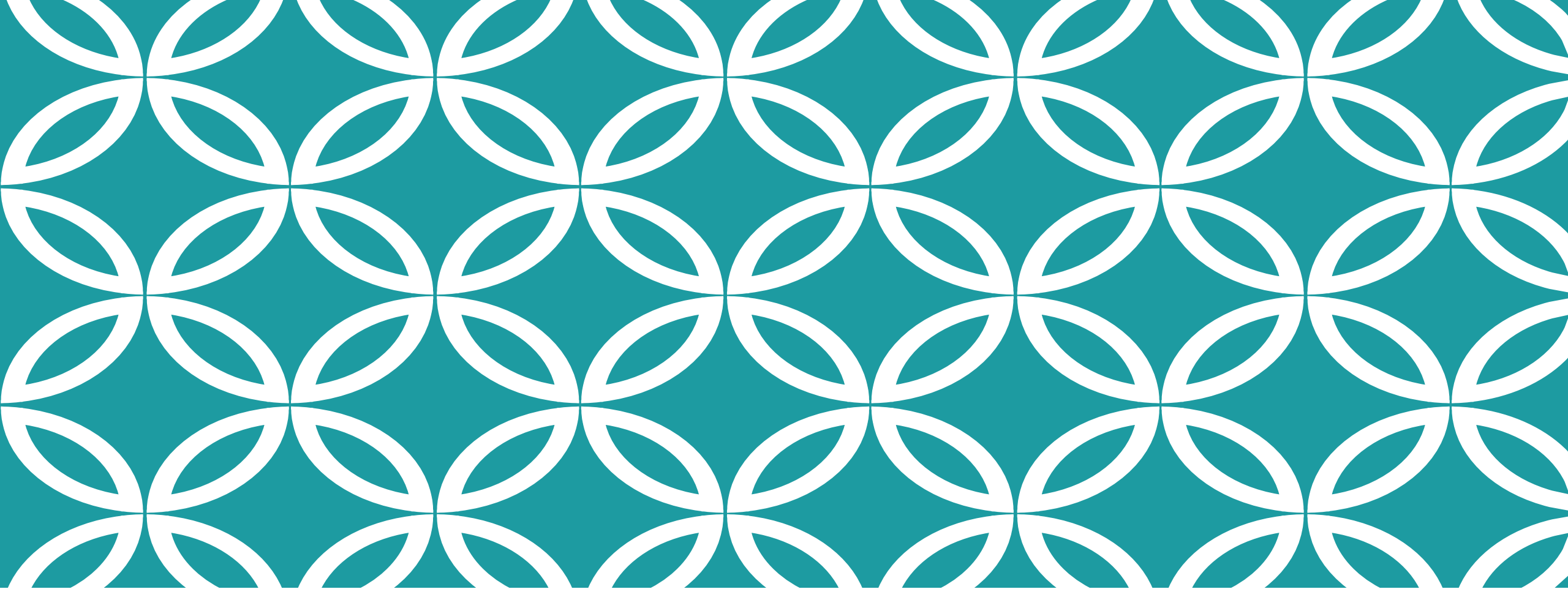
PEMETAAN INDIKATOR KINERJA SASARAN BAGI DITJEN PPI

Sasaran 4 : Terwujudnya ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi dan penyiaran untuk memberikan kontribusi peningkatan ekonomi rakyat dan kedaulatan negara

| IKP 3 | Output | Peta Peran DJPPI | | | | |
|--|--|---------------------|---|----------|----------------|--------------------------------------|
| | | Dir. Telekomunikasi | Dir. Penyiaran | Dir. Pos | Dir. PitaLebar | Dir. Pengendalian |
| Jumlah lembaga penyiaran komunitas yang menyiarkan konten budaya lokal | <ul style="list-style-type: none"> Jumlah LPK yang menyiarkan konten budaya lokal | | <ul style="list-style-type: none"> Kajian positioning LPK dalam era Digital Regulasi konten siaran yang memuat kearifan lokal | | | Pengendalian pemilik izin siaran LPK |

Isu-isu Strategis yang Memerlukan Arahan Pimpinan

1. Perubahan struktur organisasi / penegasan terhadap lokasi yang menjadi kewenangan Direktorat Pita Lebar dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekosistem pita lebar terkait adanya pelimpahan sebagian kewenangan dan tugas Direktorat Pita Lebar ke BP3TI yang meliputi hal-hal berikut :
 - a. Terhadap semua usulan program, kewajiban, pelayanan universal telekomunikasi dan informatika langsung disampaikan ke BP3TI
 - b. Proses verifikasi usulan sampai dengan implementasi dilakukan oleh BP3TI
 - c. Monitoring dan evaluasi terhadap program KPU USO mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, implementasi sampai dengan keberlangsungan layanan dan pemanfaatan program KPU USO yang optimal oleh masyarakat
2. Perlu penegasan terkait Pembangunan infrastruktur penyiaran untuk mendukung ASO yang selama ini dilakukan oleh Subdit Infrastruktur Penyiaran pada Direktorat Pita Lebar.
3. Monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan penomoran dan tariff yang pelaksanaannya masih dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi
4. Pembentukan Badan Penomoran IP
5. Pengembangan Broadcasting Fund



TERIMA KASIH |